

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Sejarah Pemberadaban: Mengenalkan Norbert Elias pada Sosiologi Indonesia	
Anton Novenanto	183–191
Pengembangan Objek Wisata Taman Nasional Laut Kepulauan Karimun Jawa	
Andy Umardiono	192–201
Ikhtiar Teoretik Mengkaji Peran Partai dalam Mobilisasi Politik Elektoral	
Kris Nugroho	202–214
Imagery in Thomas Hardy's "The Convergence of the Twain"	
Suryo Tri Saksono.....	215–218
Profil Kemiskinan di Surabaya: Sebuah Analisis Fenomenologis	
Hotman Siahaan.....	219–227
ASEAN's Response to the Challenge of Terrorism	
Sartika Soesilowati	228–241
The Social Construction of Indonesian Children: The Family, the School and the Media	
IGAK Satria Wibawa.....	242–250
Pemetaan Potensi Ekowisata di Taman Nasional Baluran	
Nur Emma Suriani & M. Nurdin Razak	251–260
Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya	
Antun Mardiyanta	261–271
Kebutuhan Penguasaan Bahasa Asing pada Mahasiswa Universitas Paramadina dalam Era Globalisasi	
Rizki Damayanti & Anita Maharani	272–279

Profil Kemiskinan di Surabaya: Sebuah Analisis Fenomenologis

Hotman Siahaan¹

Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

This article describes the approach to the phenomenon of poverty, especially in the context of structural poverty experienced by poor households in the city of Surabaya. Using the phenomenological approach, the number of poor families living in poor areas in the city of Surabaya is described by their subjective understanding who the actor who played in their social structure, what resources are available in their social structure, and as a productive working relationship within their social structure.

Key words: Poverty, structural poverty, phenomenology, social structure, social reality

Ditinjau dari perspektif sosiologi, kemiskinan merupakan realitas sosial yang multiparameter. Misalnya, kemiskinan dapat diukur melalui berbagai cara, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran kemiskinan secara kuantitatif misalnya, dengan mengukur kemampuan individu, keluarga atau rumah tangga dalam memenuhi beberapa kebutuhan pokoknya, baik dalam satuan kecukupan penghasilan (rupiah/bulan), satuan kecukupan pengeluaran (konsumsi beras/bulan/kapita), maupun satuan kecukupan konsumsi energi makanan (kilo kalori/hari/kapita). Pengukuran kemiskinan secara kualitatif, misalnya, dengan mendeskripsikan realitas kemiskinan secara naratif dengan menggunakan konstruksi teks, konteks, dan/atau menggunakan visualisasi data, baik yang berupa rekaman foto maupun video. Dalam penelitian sosiologis, konstruksi teks atau konteks lazim digunakan oleh peneliti konvensional, terutama yang mengacu pada penggunaan *thick description* sebagaimana dilakukan Geertz. Visualisasi dengan menggunakan rekaman foto dan/atau video lazim digunakan oleh peneliti kontemporer yang menggunakan metode PAR (*participatory action research*).

Semua cara pengukuran kemiskinan tersebut, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sama-sama menggunakan persepsi objektif. Kemiskinan tersebut justru diukur dari persepsi orang luar atau orang yang benar-benar tidak mengalami kemiskinan itu sendiri. Ditinjau secara metodologis, pengukuran kemiskinan secara objektif tersebut menimbulkan peluang yang besar terhadap terjadinya bias data,

fakta dan/atau informasi lapangan. Kemiskinan merupakan realitas sosial yang sebenarnya hanya mereka yang mengalami kemiskinan sendirilah yang tahu secara pasti, tentang apa sebenarnya kemiskinan itu.

Istilah miskin atau yang dalam bahasa Indonesia lazim dikonsepsikan sebagai keadaan yang “serba kekurangan”, jelas akan berbeda ketika konsep tersebut digunakan untuk mengukur kemiskinan yang terjadi di berbagai tipologi komunitas, dan tidak hanya pada komunitas pedesaan maupun perkotaan saja. Dalam komunitas di pedesaan Jawa tradisional, misalnya, kemiskinan akan dikonsepsikan dengan istilah “kekurangan” saja, dan bukan “serba kekurangan”, karena konsep itu lazim disebut dengan istilah “benar-benar sangat miskin sekali” atau *kesrakat*. Berkembangnya konseptualisasi kemiskinan mengindikasikan adanya berbagai variasi dalam memahami kemiskinan di berbagai tipologi masyarakat di Indonesia.

Jika kini pemerintah Indonesia menggunakan empat belas indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan, maka persoalannya menjadi tidak sederhana. Misalnya, realitas tersebut bisa menjadi dibesar-besarkan atau justru malah dkecil-kecilkan. Kasus berkembangnya polemik tentang berapa juta sebenarnya jumlah penduduk miskin di Indonesia misalnya, adalah contoh bahwa cara pengukuran kemiskinan tersebut masih menimbulkan masalah, karena ukuran tersebut dirancang oleh pemerintah, yang *notabene* bukan pihak yang mengalami realitas kemiskinan. Istilah *kesrakat* (dalam bahasa Jawa,

¹ Korespondensi: H. Siahaan. Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Jalan Airlangga 4 - 6 Surabaya 60286, Indonesia. Telepon: (031) 5034015. E-mail: hms.siahaan@yahoo.com.

yang berarti “benar-benar sangat miskin sekali”, jelas belum terakomodasi dalam konteks tersebut.

Dalam studi-studi sosiologi kontemporer, mulai muncul tradisi akademik untuk mengukur kemiskinan dari persepsi orang miskinnya sendiri, baik kemiskinan yang berdimensi struktural maupun kultural. Cara mengukur kemiskinan seperti ini jauh akan dapat memberikan data, fakta dan/atau informasi yang sesungguhnya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan dari persepsi subjektif adalah metode fenomenologi. Di Indonesia, metode pengukuran kemiskinan secara fenomenologis masih belum lazim digunakan. Dengan alasan masih sangat banyak jumlah penduduk miskin (baik dalam satuan individu, keluarga maupun rumah tangga), sehingga jika menggunakan metode tersebut tentu akan sangat merepotkan dan memerlukan banyak biaya.

Selain itu, juga karena kemungkinan adanya banyak variasi tentang konsep kemiskinan yang berkembang di berbagai tipologi masyarakat di Indonesia, baik yang dilihat dari dimensi ruang (misalnya, masyarakat desa atau kota), dimensi wilayah (misalnya, masyarakat Jawa atau luar Jawa), dimensi modernitas (misalnya, masyarakat tradisional atau modern), dimensi lokalitas (misalnya, masyarakat pedalaman atau pesisir), dan berbagai dimensi lain yang merupakan karakter dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Metode fenomenologis untuk mengukur dan/atau mendeskripsikan kemiskinan menjadi signifikan, ketika kita perlu data, fakta dan/atau informasi tentang kemiskinan dari persepsi orang miskinnya sendiri. Dalam konteks ini, metode klasik yang pernah digunakan oleh Oscar Lewis (1998) ketika mendeskripsikan tentang “Kisah Lima Keluarga: Telaah-Telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan”, layak digunakan sebagai acuan. Meski Lewis lebih menekankan pada deskripsi tentang kebudayaan kemiskinan yang terjadi di Meksiko masa lalu, tetapi model deskripsi seperti itu menarik dicermati. Misalnya, bagaimana Lewis mendeskripsikan apa dan bagaimana kegiatan sosial dan/atau ekonomi yang dilakukan rumah tangga miskin dalam kesehariannya, baik yang dilakukan oleh ayah, ibu maupun anak-anaknya.

Dalam konteks itulah, artikel ini akan menjelaskan secara empiris bagaimana profil kemiskinan struktural pada rumah tangga miskin yang tinggal di wilayah kelurahan yang paling miskin di kota Surabaya, dengan menggunakan metode fenomenologi. Profil kemiskinan struktural pada wilayah yang paling miskin tersebut menjadi signifikan dijelaskan,

karena rekaman data kemiskinan provinsi Jawa Timur tahun 2009 hanya menggunakan empat belas indikator pengukuran dari BPS yang dalam konsep kemiskinan strukturalnya HIPIIS belum menyentuh ke unsur-unsur strukturalnya.

Misalnya, tidak ada data tentang ada-tidaknya dan sejauhmana terjadi hubungan kerja yang eksploitatif dalam suatu sektor pekerjaan, atau tidak ada data tentang adanya berbagai ketimpangan struktural dalam jalinan hubungan kerja produktif dalam suatu sektor pekerjaan. Dalam konteks ini, permasalahan struktur sosial menjadi *setting* tersendiri, dengan pertimbangan bahwa struktur sosial di perkotaan secara teoretik lazim dideskripsikan sebagai struktur sosial yang longgar, karena pola hubungan-hubungan sosialnya meluas atau lazim disebut sebagai *multistranded relations*.

Teorisasi Kemiskinan di Indonesia

Telah banyak studi tentang kemiskinan di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, LSM maupun pihak-pihak lain yang berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Studi-studi tersebut pada umumnya menggunakan metode pengukuran kemiskinan secara kuantitatif (objektif), misalnya, mengukur jumlah konsumsi beras per kapita per tahun, mengukur tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun, mengukur kebutuhan gizi minimum per orang per hari, mengukur pendapatan minimum per kapita per tahun, mengukur konsumsi kalori per kapita per hari, mengukur pengeluaran per kapita per bulan, dan mengukur indeks mutu hidup (*physical quality of life index* atau PQLI).

Selain metode-metode pengukuran tersebut, kini BPS Indonesia menggunakan empat belas indikator untuk mengukur kemiskinan di Indonesia, baik kemiskinan yang terjadi di pedesaan maupun di perkotaan. Keempat belas indikator tersebut adalah (1) luas lantai rumah; (2) jenis lantai rumah; (3) jenis dinding rumah; (4) fasilitas tempat buang air besar; (5) sumber air minum; (6) penerangan yang digunakan; (7) bahan-bahan bakar yang digunakan; (8) frekuensi makan dalam sehari; (9) kebiasaan membeli daging/ayam/susu; (10) kemampuan membeli pakaian; (11) kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik; (12) lapangan pekerjaan kepala rumah tangga; (13) pendidikan kepala rumah tangga; dan (14) kepemilikan aset.

Ditengarai, keempat belas indikator tersebut tidak dapat untuk mengidentifikasi dimensi kemiskinan apa yang sebenarnya sedang dialami oleh rumah tangga

miskin di Indonesia. Misalnya, apakah kemiskinan dalam rumah tangga tersebut berdimensi struktural atau kultural. Realitas di Indonesia menunjukkan, sejak tahun 1980-an dan mungkin sekali hingga kini, kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang sebagian besar dialami oleh rumah tangga justru lebih berdimensi struktural, baik yang terjadi di daerah pedesaan maupun perkotaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Selo Soemardjan (Alfian 1980), bahwa:

“... kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka”.

Menurut Selo Soemardjan, golongan masyarakat yang menderita kemiskinan struktural tersebut yaitu (1) para petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau para petani yang tanahnya sangat sempit; dan (2) para buruh atau para *unskilled laborers* yang lain, para pengusaha kecil yang berusaha tanpa modal atau tanpa fasilitas dari pemerintah (lazim disebut golongan ekonomi sangat lemah). Berkaitan dengan realitas kemiskinan, kemudian himpunan Indonesia untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial (HIPIS) merumuskan definisi tentang kemiskinan struktural, sebagaimana dikemukakan oleh Selo Soemardjan tersebut. Jika dicermati, dalam definisi tersebut tampak bahwa esensi kemiskinan struktural adalah tidak adanya hubungan produktif dalam suatu komunitas, padahal dalam komunitas tersebut sebenarnya tersedia sumber dayanya.

Dalam komunitas di pedesaan, sumber daya tersebut misalnya, berupa lahan pertanian produktif, modal untuk pengolahan lahan pertanian, teknologi untuk pengolahan lahan pertanian dan berbagai keterampilan lainnya yang berkaitan dengan pengolahan lahan pertanian. Selain itu, jika golongan miskin tersebut bukan golongan petani, misalnya, golongan pedagang kecil, maka sumber daya produktifnya adalah modal usaha, keterampilan, pemasaran dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan aktivitas proses produksi suatu barang yang bisa diperjualbelikan di pasar pedesaan.

Dalam komunitas di perkotaan, sumber daya produktifnya menjadi sangat bervariasi, tidak terbatas, dan terkesan apa pun bisa menjadi sumber daya. Dalam konteks inilah kemudian berbagai masalah muncul, karena seandainya terjadi kemiskinan struktural di perkotaan tidak mudah untuk mengidentifikasi dimensinya. Hal tersebut dikarenakan setidaknya-tidaknya dua hal berikut, yaitu

(1) pada umumnya kemiskinan yang terjadi di perkotaan dialami oleh para migran yang berasal dari daerah pedesaan, sehingga mereka sebenarnya tidak memiliki sumber daya struktural di perkotaan yang seharusnya tersedia untuk mereka; dan (2) berkaitan dengan tidak dimilikinya sumber daya struktural, maka kemiskinan yang terjadi bukan karena pada ketimpangan struktur sosial, melainkan karena tidak kondusifnya struktur sosialnya, sehingga menyebabkan rumah tangga miskin tidak bisa bekerja secara produktif.

Para migran adalah orang-orang justru telah tercabut dari struktur sosial lamanya di pedesaan, akan tetapi mereka belum dapat masuk ke dalam struktur sosial baru di perkotaan. Oleh karena itu, mereka lazim disebut sebagai “massa apung” yang berada di perkotaan, yang akan melakukan pekerjaan apa saja asal mendapatkan uang, atau lazim dikenal dengan istilah kerja *serabutan*. Konsep kemiskinan struktural yang digunakan untuk studi-studi kemiskinan di perkotaan harus dipahami secara lebih makro, dalam arti bahwa sumber daya struktural yang seharusnya tersedia bagi anggota komunitas. Oleh karena itu sumber daya tersebut seharusnya didistribusikan secara merata, karena jumlahnya tidak terbatas.

Dalam komunitas di pedesaan, sumber daya tersebut pada intinya berupa lahan pertanian produktif, akan tetapi di perkotaan bisa berupa ijazah pendidikan, modal usaha, keterampilan kerja, hubungan kerja, pengalaman kerja, dan berbagai sumber daya lainnya yang masuk ke dalam kategori persyaratan kerja formal dan/atau informal. Adanya dualisme struktural tersebut seringkali menyebabkan para orang miskin dan/atau rumah tangga miskin di daerah perkotaan yang pada umumnya para migran dari pedesaan melakukan berbagai kegiatan ekonomi sisa (*scavenging economy*), dengan semboyan utama “asal dapat uang”. Kegiatan tersebut misalnya, sebagai tukang becak, pemulung sampah, tukang cuci pakaian, buruh bangunan, buruh *serabutan*, pengemis dan berbagai kegiatan ekonomi sisa lainnya yang bisa digunakan untuk menyambung hidup. Dengan kata lain, seandainya kegiatan-kegiatan tersebut dipakai sebagai contoh dan/atau bukti dalam realitas kemiskinan di perkotaan, maka kemungkinan kemiskinan tersebut justru bukan karena adanya struktur sosial yang tidak produktif, akan tetapi struktur sosial yang tidak kondusif.

Meski telah dua puluh tahun lebih konsep tentang kemiskinan struktural diintroduksi dan/atau digunakan secara nasional di Indonesia, tetapi

tampaknya tetap saja metode untuk mengukur kemiskinan tidak menggunakan dimensi subjektif. Berapa jumlah riil orang, keluarga atau rumah tangga miskin di Indonesia, misalnya, dari tahun ke tahun hanya dilaporkan oleh BPS Indonesia secara kuantitatif saja. Secara historis, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan BPS Indonesia relatif tidak berubah, apalagi jika dilihat dari kaitannya dengan dimensi struktural dan kultural tentang realitas kemiskinan yang terjadi. Pengukuran kemiskinan tersebut justru tidak menggunakan sesuatu hal yang sangat esensial, yang tumbuh dan/atau berkembang dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, yaitu adanya realitas kemiskinan secara struktural dan kultural, atau justru komplementasi dari keduanya yang secara realistik terjadi di lapangan.

Pada tahun 1976, untuk mengukur kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan, BPS Indonesia menggunakan indikator pengeluaran dari dua belas jenis bahan pangan, yaitu padi-padian dan hasilnya, umbi-umbian dan hasilnya, ikan dan hasil-hasil ikan lainnya, daging, telur, susu dan hasil-hasil dari susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, konsumsi lainnya, makanan yang sudah jadi, minuman yang mengandung alkohol, tembakau dan sirih. Selain itu, BPS Indonesia juga menggunakan komponen pengeluaran dari lima jenis bahan non-pangan, yaitu (perumahan, bahan bakar, penerangan dan air); (barang-barang dan jasa-saja); (pakaian, alas kaki dan tutup kepala); (barang-barang yang tahan lama); dan (keperluan pesta dan upacara).

Pada tahun 2000-an, BPS Indonesia menggunakan delapan indikator, yaitu luas lantai per kapita, jenis lantai, air minum (ketersediaan air bersih), jenis jamban (WC), kepemilikan aset, pendapatan (total pendapatan per bulan), pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan), dan konsumsi lauk-pauk (daging, telur dan ayam). Pada tahun 2005, BPS Indonesia menggunakan empat belas indikator untuk mengukur kemiskinan, sebagaimana telah dikemukakan di muka. Terlepas dari variabel dan/atau indikator apa yang paling tepat untuk mengukur kemiskinan di Indonesia, penelitian ini tidak akan mempermasalahkannya.

Artikel ini hanya mendeskripsikan bagaimana profil kemiskinan struktural pada suatu rumah tangga miskin yang bertempat tinggal di daerah (level kelurahan) yang paling miskin yang berada di wilayah kota Surabaya, dengan menggunakan cara pengukuran secara subjektif atau sesuai dengan persepsi rumah tangga miskin itu sendiri. Secara metodologis, cara pengukuran tersebut lazim disebut sebagai metode fenomenologi. Cara pengukuran

sebenarnya lebih tepat disebut sebagai cara deskripsi kemiskinan seperti itu pernah dilakukan oleh Kuswarno (2009), ketika ia mendeskripsikan realitas kemiskinan yang dialami para pengemis di kota Bandung.

Dalam penelitiannya tersebut, Kuswarno menggunakan metode fenomenologi, antara lain dengan meneliti bagaimana cara orang miskin mengkomunikasikan simbol-simbol kemiskinannya sendiri, sehingga orang lain menangkap simbol-simbol tersebut. Ditemukan data bahwa para pengemis pun berupaya menampilkan diri secara profesional, dalam arti dalam penampilannya itu dirancang sedemikian rupa, agar bisa mengundang belas-kasihan orang lain. Misalnya, dengan mengenakan pakaian compang-camping untuk mengesankan serba kekurangan, salah satu tangan atau kakinya dibalut perban untuk mengesankan adanya kecacatan tubuh, cara berjalannya dibuat terseok-seok untuk mengesankan bahwa ia kelaparan, dan dengan cara menggunakan komunikasi bahasa lisan yang mengesankan belas-kasihan.

Dinamika Konsep kemiskinan

Ada beberapa konsep kemiskinan yang pernah diperdebatkan secara akademis dan/atau digunakan di Indonesia, baik yang diintroduksi oleh pemerintah (BPS) maupun universitas (para akademisi). Konsep-konsep tersebut pada umumnya berdimensi pada ketidakmampuan dalam memenuhi beberapa kebutuhan pokoknya, baik dalam ukuran besarnya penghasilan (rupiah/bulan), jumlah konsumsi beras (kilogram/bulan/kapita), maupun ketercukupan kalori (Kkal/hari/kapita). Konsep ketidakmampuan tersebut akan sangat relatif jika dibandingkan dengan dinamika laju inflasi dan dinamika harga sembako yang terjadi di setiap provinsi, kota maupun kabupaten.

Konsep tersebut akan selalu ketinggalan zaman jika digunakan untuk mendeskripsi, apalagi untuk mengukur kemiskinan secara aktual. Akibatnya menjadi wajar atau sah-sah saja jika data kemiskinan di Indonesia tidak pernah benar, dalam arti (1) validitasnya layak dipermasalahan; dan (2) reabilitasnya juga layak diperdebatkan. Adanya perbedaan data yang signifikan tentang berapa sebenarnya jumlah (angka) kemiskinan di Indonesia yang dikemukakan oleh berbagai instansi pemerintah, misalnya, merupakan bukti bahwa konsep dan parameter kemiskinan yang digunakan masih menjadi masalah.

Sejak tahun 2004, BPS tidak lagi memahami kemiskinan hanya sebatas ketidakmampuan secara ekonomi saja, tetapi juga kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar” dan “perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Konsep kemiskinan dirumuskan dengan berbasis hak, yaitu hak dalam memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Dengan menggunakan konsep berbasis hak, tampaknya kini negara mulai menghargai, melindungi dan memenuhi berbagai hak dasar dari masyarakat miskin, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, misalnya pada pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Selain itu, pada pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan (4) disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (ayat, 1).

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” (ayat, 2).

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” (ayat, 3).

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun” (ayat, 4).

Pada pasal 34 ayat (1), (2), dan (3), juga disebutkan bahwa:

“Fakir-miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” (ayat, 1).

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” (ayat, 2).

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum” (ayat, 3).

Mencermati beberapa pasal esensial tersebut, tampak bahwa masalah kemiskinan sebenarnya merupakan masalah yang secara filosofis sangat jelas, sehingga seharusnya tidak perlu ditarik kemana-mana, didiskusikan dan bahkan diperdebatkan. Oleh karena itu konsep kemiskinan dirumuskan dengan berbasis hak, dengan beberapa strategi utama penanggulangannya yang meliputi, (1) perluasan kesempatan; (2) pemberdayaan kelembagaan masyarakat; (3) peningkatan kapasitas; (4) perlindungan sosial; dan (5) penataan kemitraan global.

Fenomenologi Kemiskinan

Fenomenologi sebagai sebuah perspektif keilmuan berkembang atas jasa Alfred Schutz (Ritzer & Goodman 2004), di mana dalam penjelasannya Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, sementara mereka hidup dalam aliran kesadaran mereka sendiri. Perspektif ini menggunakan kerangka inter-subjektivitas dalam memahami suatu realitas sosial. Dalam dunia inter-subjektivitas itulah, orang menciptakan realitas sosial dan dipaksa oleh kehidupan sosial yang telah ada, dan oleh struktur kultural ciptaan leluhur mereka. Dalam memahami realitas kehidupan sosial ini, Schutz membedakan kehidupan sosial yang memiliki hubungan tatap-muka yang akrab dan hubungan impersonal yang renggang. Apa pun jenis hubungan sosial yang berkembang, menurut Schutz suatu studi fenomenologi tetap memfokuskan pada upaya atau bagaimana cara memahami kesadaran orang lain, sementara mereka hidup dalam aliran kesadarannya mereka sendiri.

Dalam perspektif fenomenologi, suatu realitas kemiskinan tidak dilihat secara objektif seperti ukuran-ukuran yang telah dijelaskan, tetapi justru dilihat secara subjektif. Dalam perspektif metode fenomenologi, kemiskinan adalah sebuah realitas sosial yang dialami sendiri oleh suatu rumah tangga miskin, dan oleh karena itulah rumah tangga mereka sendirilah yang akan lebih tepat untuk mendeskripsikannya, apalagi jika kemiskinan tersebut berdimensi struktural. Dalam konteks ini, metode fenomenologi dipandang tepat untuk mendeskripsikan dimensi kemiskinan tersebut, agar berbagai dimensi subjektif yang dilatarbelakangi oleh adanya keragaman pandangan hidup, motivasi, tradisi, dan tentu saja berbagai ikatan primordial lainnya (misalnya, etnis, agama, kedaerahan) bisa terakomodasi secara baik. Orang Madura misalnya, jelas akan berbeda dengan orang Jawa ketika mereka

diminta mengkonsepkan tentang kemiskinan, apalagi jika kedua etnis tersebut sama-sama menyambung hidup di Surabaya sebagai kaum migran.

Secara substansial, metode fenomenologi merupakan salah satu metode yang memfokuskan pada upaya pemahaman makna (*meaning*) secara subjektif terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang (individu) dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Schutz (Ritzer & Goodman 2004), seseorang (individu) mengkonstruksikan suatu makna (*meaning*) dengan cara melakukannya melalui pemusatan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, sementara mereka hidup dalam kesadarannya mereka sendiri. Dalam konteks ini, termasuk bagaimana seseorang (individu) membentuk pengalaman dan melihat objek-objek tertentu, sementara seseorang (individu) tersebut hidup dalam lingkungannya sendiri.

Menurut Schutz, dalam memahami makna (*meaning*), seseorang (individu) juga menggunakan perspektif inter-subjektif (dalam arti yang lebih luas) untuk memahami kehidupan sosialnya, terutama mengenai bagaimana pengetahuan sosialnya terbentuk. Hubungan antar-makna tersebut diorganisir secara bersama-sama. Schutz menyebut hal itu sebagai sekumpulan pengetahuan (*stock of knowledge*). Sekumpulan pengetahuan itulah yang dimiliki oleh para subjek yang memaknai sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Proses pemaknaan itulah yang menjadi menarik dicermati, karena terjadi tarik-menarik antar-individu yang sama-sama merasa memiliki pengetahuan secara subjektif tentang dirinya sendiri dan orang lain disekelilingnya.

Berdasarkan data kemiskinan provinsi Jawa Timur 2009, terdapat tiga kategori kemiskinan, yaitu sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang didata dengan menggunakan empat belas indikator. Dalam konteks ini, yaitu bagaimana profil kemiskinan struktural akan dideskripsikan secara lebih longgar, dalam arti bahwa pemaknaan struktur sosial yang secara konseptual dianggap sebagai sumber daya produktif akan lebih meluas. Selain karena level analisisnya yang berbeda, juga karena jumlah peran produktifnya tidak terbatas. Sumber daya tersebut justru lebih sulit diakses oleh mereka yang tidak memiliki persyaratan khusus, yang sesuai dengan pengalokasiannya. Secara konseptual, konsep kemiskinan struktural seharusnya diperluas pengertian struktur sosialnya, yang tidak terbatas hanya pada struktur sosial komunitas lokal saja (misalnya, pada komunitas se-desa), akan tetapi justru pada level struktur sosial kota (misalnya, seluruh wilayah kota).

Hal tersebut dikarenakan temuan dan/atau berbagai hasil penelitian kemiskinan di perkotaan selalu meyakini bahwa kemiskinan yang terjadi di perkotaan sebagai akibat dari tekanan struktur ekonomi kota yang tidak kondusif. Misalnya, jika kemiskinan struktural tersebut terjadi di kalangan buruh industri, maka yang disebut struktur sosial di situ adalah pola hubungan produktif antara sang pemberi kerja (juragan) dengan pelaksana kerja (buruh). Ketidakberdayaan buruh dalam melakukan tawar-menawar dengan juragan, misalnya, adalah merupakan contoh betapa kemiskinan yang terjadi di kalangan buruh adalah termasuk dalam dimensi kemiskinan struktural.

Deskripsi tentang profil kemiskinan struktural dalam konteks artikel ini juga akan dikemukakan secara lebih longgar, yaitu deskripsi tentang (1) siapa yang bermain dalam suatu struktur sosial; (2) apa sumber daya produktif yang sebenarnya tersedia dalam suatu struktur sosial; dan (3) bagaimana hubungan kerja produktif antar-struktur. Ketiga dimensi tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ditengarai akan bisa mendeskripsikan bagaimana sebenarnya profil kemiskinan struktural yang terjadi pada rumah tangga miskin, terutama yang tinggal di wilayah yang paling miskin di kota Surabaya.

Aktor-Aktor yang Bermain dalam Struktur Sosial

Dalam suatu struktur sosial tentu ada para pihak yang bermain peran dalam mendistribusikan sumber daya produktif. Dalam hubungan kerja pertanian di pedesaan, misalnya, permainan dalam struktur sosial tersebut ditunjukkan ke dalam hubungan antar-peran produktif, sehingga ada pemain peran sebagai petani pemilik dan/atau penguasa lahan pertanian dan ada juga pemain peran sebagai buruh tani. Hubungan antar-peran produktif dalam struktur sosial pertanian tersebut menghasilkan pola hubungan patron-klien, sebagaimana dikonsepsikan oleh Scott (1979) dalam penjelasannya tentang moral dan perilaku ekonomi petani kecil di pedesaan.

Dalam konteks ini, ternyata di wilayah yang menjadi *setting* penelitian tidak banyak dan bahkan bisa dikatakan tidak ada pemain peran yang secara produktif memberikan peran kepada pihak lain. Di wilayah ini tidak ada juragan yang memberi kerja kepada buruh. Hal ini dikarenakan, di wilayah ini pada umumnya didiami oleh para migran dari etnis Madura yang dalam melakukan kerja produktif akan melakukannya secara mandiri. Mereka menjadi

tukang rombeng sendiri, menjadi pumulung sendiri, dan menjadi pedagang kecil (penjaja makanan kecil) yang sekaligus juga menjadi juragan dari dirinya sendiri.

Dikemukakan oleh (A) tukang rombeng yang rumah tangganya termasuk ke dalam kategori sangat miskin, bahwa:

“... ia menjalani pekerjaan sebagai tukang rombeng sejak tahun 1980-an ketika ia putus sekolah di desanya. Ia merantau ke Surabaya, dengan tujuan bisa mencari kerja apa pun, agar bisa untuk menyambung hidup”.

(A) berumah tangga dengan perempuan se-desa dan isterinya diajak merantau ke Surabaya. Dalam sebuah rumah tangga yang termasuk ke dalam kategori sangat miskin, maka kebutuhan hidup sehari-harinya dicukupi seadanya saja. (A) memiliki anak tiga orang yang masih balita, keluarga ini merasa bahwa hidup di kota harus berjuang sendiri, karena di kota tidak ada yang menyantuni. Sebagaimana dikatakannya, bahwa:

“Hidup di kota harus berani berjuang, apa saja bisa dilakukan, karena rezeki sudah diatur oleh Allah swt. Kita sebagai manusia hanya menjalaninya saja”.

Jika diinterpretasi, pernyataan tersebut terkesan bahwa keberadaan sumber daya produktif ada di mana-mana, karena itu tidak perlu mencari juragan kemana-mana yang harus mempekerjakannya. Sumber daya produktif tersebut, dianggapnya telah ada yang mengatur dan/atau mendistribusikannya sendiri secara adil. Kemiskinan yang dialaminya bukan karena ketidakpedulian pihak lain (misalnya, pihak yang bisa menjadi juragan), tekanan pihak lain (misalnya, juragan yang melakukan eksploitasi kerja), atau pihak mana pun yang dalam konsep kemiskinan struktural lazim dikonsepskan sebagai para pihak yang mampu memberikan peran produktif secara sosial dan ekonomi kepada pihak lain, terutama pihak lapisan bawah.

Sumber Daya Produktif yang Tersedia dalam Struktur Sosial

Lebih lanjut, seperti yang dikemukakan oleh mereka (para rumah tangga sangat miskin dan hampir miskin), ternyata meski secara statistik kedua tipologi kemiskinan tersebut berbeda (dibedakan) oleh jumlah skor kumulatif dari empat belas indikator pengukur kemiskinan, akan tetapi dalam konteks kemiskinan struktural, perbedaannya tidak

tajam. Dalam dimensi berlangsungnya hubungan kerja produktif antar-struktur (pihak pemberi kerja dan pihak pelaksana kerja), mereka sama-sama tidak saling tergantung kepada pihak lain.

Jika kemiskinan struktural di pedesaan terjadi, karena para petani *gurem* tidak bisa melakukan kerja produktif (misalnya, tidak memiliki lahan pertanian dan modal untuk membeli sarana produksi), maka kemiskinan struktural yang terjadi di perkotaan agak sedikit berbeda. Meski sumber daya struktural tersebut sebenarnya tidak terbatas, akan tetapi justru tidak bisa dijangkau oleh mereka yang tidak memiliki akses tertentu. Dalam mengakses sumber daya tersebut harus memiliki akses tertentu, misalnya, keterampilan kerja, pengalaman kerja atau berbagai persyaratan lain yang pada umumnya tidak dimiliki oleh rumah tangga miskin.

Struktur ekonomi kota yang dalam kenyataannya lebih longgar karena menawarkan berbagai kemungkinan untuk dapat mengaksesnya, ternyata justru tidak kondusif terhadap para rumah tangga miskin tersebut. Kemiskinan yang dideritanya sebenarnya tidak saja berupa kemiskinan versi BPS Indonesia, tetapi komplikasi antar-berbagai kondisi struktur sosial, ekonomi dan bahkan politis yang tidak kondusif bagi mereka. Perbedaan antara mereka yang termasuk ke dalam kategori sangat miskin (kategori 3), miskin (kategori 2), dan hampir miskin (kategori 1), tidak signifikan jika dikaitkan dengan ada-tidaknya dan/atau sejauhmana terjadi hubungan produktif antar-struktur.

Jika seorang petani di pedesaan hanya bisa melakukan peran produktif jika tersedia lahan pertanian secara *on farm*, maka berbeda situasinya dengan para kaum miskin di perkotaan. Para kaum miskin di perkotaan bisa apa saja mereka lakukan, asal bisa mendatangkan uang. Permasalahannya adalah, tekanan struktur tersebut ternyata lebih kuat bersifat makro. Dan oleh karena itulah, seringkali dikatakan secara awam bahwa ternyata “ibukota lebih kejam daripada ibu tiri”.

Ditinjau secara sosiologis, pernyataan tersebut bisa diinterpretasi bahwa tekanan struktural di perkotaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural sangatlah besar. Dalam kenyataannya, struktur tersebut menekan dari arah mana pun, dari sumber daya apa pun dan berlangsung kapan pun. Tekanan tersebut tidak berbeda intensitasnya, meski kategori tingkat kemiskinannya berbeda, yaitu antara mereka yang termasuk ke dalam kategori sangat miskin (kategori 3), dengan mereka yang termasuk ke dalam kategori hampir miskin (kategori 1).

Hubungan Kerja Produktif dalam Struktur Sosial

Dimensi ketiga yang digunakan untuk mendeskripsikan profil kemiskinan adalah hubungan kerja produktif dalam suatu struktur sosial. Dalam realitas sosial, dimensi ini lebih banyak terjadi di suatu daerah pedesaan, adanya hubungan kerja dalam pengolahan lahan pertanian atau yang lazim disebut *patron-client relationships*, atau bisa juga terjadi di suatu daerah perkotaan, terutama dalam hubungan kerja industrial. Selain terjadi di dalam struktur sosial seperti itu, agak sulit ditemukan terjadinya hubungan kerja produktif, dalam arti hubungan kerja antara dua pihak yang bekerja-sama saling membutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan kemudian melakukan pembagian hasil kerjanya secara seimbang.

Hasil dari hubungan kerja seperti itu, biasanya, berupa pembagian hasil kerja atau lazim disebut sebagai bagi-hasil, baik yang dilakukan dengan cara memodifikasi sistem borongan, harian atau benar-benar menggunakan sistem bagi-hasil, dalam arti menggunakan persentase atau perbandingan dalam perolehan hasil akhir, misalnya 50%:50%. Pada masyarakat perkotaan, sistem bagi-hasil dalam perolehan hasil kerja tersebut hanya digunakan dalam sektor-sektor pekerjaan tertentu saja, misalnya, sektor transportasi taksi dan angkutan kota; sementara untuk sektor-sektor pekerjaan yang lain lazim menggunakan sistem pengupahan mingguan atau bulanan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui ternyata di lokasi penelitian hanya ada beberapa saja hubungan kerja produktif. Misalnya, hubungan kerja yang terjadi ketika sebuah keluarga mempekerjakan seseorang sebagai “buruh serabutan”, yaitu sebagai buruh pencuci pakaian. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ibu rumah tangga bernama (S), bahwa:

“... ia bekerja sebagai buruh pencuci pakaian dalam satu keluarga (ia sebut juragan), dengan upah mingguan sebesar Rp50.000,00. Menurutnya, upah sebesar itu sudah besar, *alhamdulillah*, masih ada juragan yang mau mempekerjakannya ...”

Menurutnya, di daerah ini hanya beberapa keluarga saja yang memiliki buruh pencuci pakaian. Itupun sebenarnya bukan karena mereka termasuk keluarga kaya yang mampu mengupah, akan tetapi hanya karena mereka masih ada hubungan keluarga. Dalam konteks ini, bekerja sebagai pencuci pakaian tidak bisa dipahami sebagai hubungan kerja

produktif, dalam arti memperhitungkan apa dan berapa sumber daya yang dimiliki, dan lebih jauh daripada itu, apa dan berapa perolehan hasilnya. Hubungan kerja tersebut tidak bisa dipahami sebagai hubungan kerja secara ekonomi, tetapi hanya sebagai hubungan kerja secara sosial saja.

Realitas lain menunjukkan, di kalangan rumah tangga yang tergolong hampir miskin (kategori 1), ternyata juga tidak ditemukan hubungan produktif. Mereka yang termasuk kategori ini yang menurut Scott (1979) dianalogikan “bagaikan orang yang terendam di dalam kolam sampai sebatas leher, sehingga ombak sekecil apa pun telah mampu untuk menenggelamkannya”, juga harus bekerja secara mandiri. Keluarga dalam kategori ini, biasanya mempunyai usaha sendiri, meski secara kecil-kecilan, sebagaimana dikatakan oleh (K), bahwa:

“... untuk mencukup kebutuhan hidup, ia membuka warung kecil-kecilan, yang menjual beberapa kebutuhan orang kampung. Katanya, ... lumayan hasilnya, daripada tidak ada penghasilan sama sekali. Di kampung sini rata-rata miskin”.

Pernyataan tersebut mengindikasikan, bahwa di lokasi penelitian tidak ada orang yang bisa disebut sebagai juragan, yang bisa mempekerjakan orang lain sebagai buruh.

Di sisi lain, jika realitas di “kampung miskin” yang secara kebetulan sebagian besar didiami oleh etnis Madura tersebut dicermati, barangkali adanya faktor kebiasaan hidup yang seadanya, dan bisa dikatakan miskin dalam konsep BPS Indonesia, dianggap bukan sebagai masalah bagi mereka. Bagi mereka, hidup di kota dengan serba kekurangan adalah bagian dari perjuangan hidup yang telah ditakdirkan oleh Allah swt. Menurut mereka, kemiskinan bukanlah sebagai musibah, akan tetapi justru sebagai berkah yang akan menguji seberapa kuat keimanan seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh (M), bahwa:

“... kalau hanya soal makan, *Insya Allah*, kami bisa makan, meski seadanya. Bagi kami, makan pakai sambal dan kerupuk saja sudah merupakan berkah...”

Pernyataan tersebut menarik dicermati, karena konsep miskin yang selama ini diukur dengan konsep serba kekurangan, ternyata secara subjektif sebenarnya tidak berlaku di daerah ini. Apalagi dengan menggunakan empat belas indikator seperti yang digunakan oleh BPS Indonesia, ternyata indikator secara objektif tersebut tidak mampu menunjukkan kemiskinan yang sebenarnya. Konsep

dan cara pengukuran kemiskinan seharusnya sangat berkaitan dengan subjektivitas dari mereka yang benar-benar mengalami kemiskinan.

Konsep dan indikator pengukuran kemiskinan yang selama ini menggunakan ukuran secara objektif, yang tentu telah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kualitas kelayakan hidup di Indonesia, ternyata belum bisa diberlakukan secara universal, dalam arti bisa berlaku untuk setiap tipologi masyarakat, baik dilihat dari segi etnis, keagamaan, kedaerahan atau ikatan-ikatan primordial lainnya. Kemiskinan adalah sebuah realitas sosial yang bisa menjadi misteri, ketika konsep dan cara-cara pengukurannya tidak melibatkan orang lain yang benar-benar mengalami kemiskinan itu sendiri.

Simpulan

Berdasarkan uraian tentang profil kemiskinan struktural rumah tangga yang tinggal di wilayah kelurahan paling miskin di kota Surabaya, sebagaimana telah dikemukakan di muka dapat ditarik kesimpulannya, yaitu:

Pertama, dilihat dari aktor-aktor yang bermain dalam struktur sosial, ternyata hanya beberapa saja aktor yang bermain peran produktif di wilayah ini, sehingga hanya ditemukan beberapa saja aktor yang memainkan peran sebagai juragan. Akibatnya, para rumah tangga miskin harus memainkan perannya sendiri dalam melakukan eksploitasi sumber daya yang dimilikinya, atau dengan kata lain “mereka menjadi juragan dari kegiatan ekonominya sendiri”.

Kedua, dilihat dari sumber daya produktif yang tersedia dalam struktur sosial, ternyata hanya beberapa saja sumber daya produktif yang bisa diakses di lokasi penelitian. Rumah tangga miskin di wilayah ini hanya melakukan eksploitasi sumber daya produktif, yang merupakan kegiatan “ekonomi sisa”, seperti misalnya, menjadi tukang becak, tukang rombeng, pemulung sampah, tukang cuci pakaian dan berdagang kecil-kecilan, dengan semboyan “asal dapat makan”.

Ketiga, dilihat dari hubungan kerja produktif antar-struktur, ternyata tidak ada hubungan kerja produktif yang terjadi antar-struktur di wilayah ini. Rumah tangga miskin di wilayah ini terpaksa bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Ketiga realitas yang menjadi unsur-unsur dalam mendeskripsikan profil kemiskinan struktural tersebut, makin memperkuat bukti empiris bahwa rumah tangga miskin, terutama kategori sangat miskin dan hampir miskin yang tinggal di daerah paling miskin di kota Surabaya yang menjadi lokasi penelitian ini, dalam posisi bagaikan “telah jatuh tertimpa tangga”, atau kondisi kemiskinannya merupakan komplikasi dari bermainnya berbagai faktor sosial, ekonomi dan bahkan politis.

Daftar Pustaka

- Alfian (1980) *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- Lewis, O (1988) *Kisah Lima Keluarga: Telaah-telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor.